

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN DI KAWASAN KOTA TUA JAKARTA

Oleh :

Dianita Rahayu Sukmawati¹⁾, Wika Hardika Legiani²⁾, Qotrun Nida³⁾

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email: dianitasukma14@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 16 Juli 2026

Revisi, 26 September 2026

Diterima, 29 September 2026

Publish, 30 September 2026

Kata Kunci :

Resistensi,
Pedagang Kaki Lima,
Kebijakan Penataan,
Kota Tua Jakarta.

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan. Di Kawasan Kota Tua Jakarta, keberadaan PKL selain memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan wisatawan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan penataan melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih, dan nyaman. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai bentuk resistensi dari PKL karena dinilai berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan penurunan pendapatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya resistensi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang kaki lima, Unit Pengelola Kawasan Kota Tua, Satpol PP. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi diwujudkan dalam bentuk tetap berjualan pada lokasi yang dilarang, menghindari petugas penertiban, serta kembali menempati lokasi semula setelah penertiban selesai. Faktor utama yang melatarbelakangi resistensi meliputi penurunan pendapatan setelah relokasi, lokasi binaan yang dianggap kurang strategis, ketergantungan ekonomi keluarga terhadap aktivitas berdagang, serta perbedaan kepentingan antara pemerintah dalam menjaga ketertiban kawasan dengan PKL dalam mempertahankan mata pencaharian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan akan lebih efektif apabila disertai komunikasi yang baik, pelibatan pedagang dalam proses pengambilan kebijakan, serta penyediaan lokasi usaha yang sesuai dengan karakteristik aktivitas ekonomi kawasan wisata.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Dianita Rahayu Sukmawati

Afiliasi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: dianitasukma14@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi sektor informal yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian masyarakat perkotaan. Keberadaan PKL mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sektor formal serta menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau. Perkembangan jumlah PKL di berbagai kota besar di Indonesia merupakan konsekuensi dari meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal. Kondisi tersebut menjadikan sektor informal sebagai alternatif utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas PKL adalah Kawasan Kota Tua Jakarta. Kawasan ini merupakan destinasi wisata sejarah yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan pariwisata yang tinggi sehingga setiap hari dikunjungi oleh masyarakat maupun wisatawan domestik dan mancanegara. Tingginya mobilitas pengunjung menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan aktivitas usaha. Berbagai jenis dagangan seperti makanan, minuman, suvenir, aksesoris, hingga jasa hiburan berkembang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan wisata tersebut.

Di sisi lain, keberadaan PKL juga menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan ruang publik. Aktivitas berdagang yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum sering mengganggu mobilitas pejalan kaki, mengurangi estetika kawasan, serta menimbulkan permasalahan kebersihan dan ketertiban. Sebagai kawasan cagar budaya yang menjadi ikon wisata Jakarta, Kota Tua dituntut memiliki kondisi lingkungan yang tertata, nyaman, aman, dan mendukung kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya penataan guna menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dengan fungsi kawasan sebagai destinasi wisata sejarah agmentasi identitas.

Upaya penataan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini mengatur mengenai penetapan lokasi usaha, pemberian izin usaha, hak dan kewajiban PKL, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi administratif bagi pedagang yang melanggar ketentuan. Selain bertujuan menciptakan ketertiban dan keindahan kota, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima melalui penyediaan lokasi binaan dan pembinaan usaha.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih banyak pedagang

kaki lima yang tetap berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan meskipun pemerintah telah melakukan penertiban maupun relokasi ke lokasi binaan. Sebagian besar pedagang beranggapan bahwa lokasi relokasi tidak mampu memberikan jumlah pembeli yang sama dengan lokasi sebelumnya sehingga berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan. Kondisi tersebut mendorong pedagang untuk kembali menempati lokasi semula sebagai bentuk upaya mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya resistensi terhadap kebijakan penataan yang diterapkan pemerintah. Resistensi merupakan bentuk respons masyarakat terhadap perubahan yang dianggap mengancam kepentingan atau keberlangsungan hidup mereka. Dalam konteks penelitian ini, resistensi tidak hanya dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai strategi masyarakat dalam mempertahankan sumber mata pencaharian di tengah pelaksanaan kebijakan penataan kawasan. Bentuk resistensi yang dilakukan pedagang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada penataan kawasan dengan pedagang yang berorientasi pada keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya resistensi tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan penataan PKL sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian kawasan wisata tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat sektor informal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta.. Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Juli 2024 hingga penelitian selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tua Jakarta belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Meskipun pemerintah telah melakukan penataan melalui relokasi, pembinaan, dan penertiban secara berkala, sebagian pedagang masih mempertahankan aktivitas berdagang pada lokasi

yang dilarang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya resistensi sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap belum mampu menjamin keberlangsungan ekonomi pedagang.

A. Bentuk-Bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta terbagi menjadi dua bentuk, yaitu resistensi aktif dan resistensi pasif.

1. Resistensi Aktif

Resistensi aktif ditunjukkan melalui tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mempertahankan ruang usaha di tengah pelaksanaan kebijakan penataan.

Bentuk pertama adalah aksi protes terbuka. Aksi ini dilakukan secara kolektif oleh pedagang sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan relokasi dan penataan yang dinilai belum memberikan kepastian bagi keberlangsungan usaha mereka. Pedagang menilai bahwa relokasi ke lokasi baru menyebabkan penurunan jumlah pembeli sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan harian. Oleh karena itu, aksi protes dilakukan sebagai upaya memperoleh perhatian pemerintah agar kebijakan yang diterapkan lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang.

Bentuk kedua adalah adaptasi strategi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang melakukan berbagai penyesuaian dalam aktivitas berdagang untuk mengurangi risiko penertiban. Strategi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan waktu berdagang berdasarkan jadwal patroli petugas, memilih lokasi yang relatif aman namun tetap dekat dengan arus wisatawan, memperkecil ukuran lapak agar mudah dipindahkan, serta mengubah jenis dagangan menjadi lebih praktis ketika menghadapi razia. Strategi tersebut menunjukkan kemampuan pedagang dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lapangan tanpa menghentikan aktivitas ekonomi mereka.

Bentuk ketiga adalah negosiasi dengan aparat penertiban. Negosiasi dilakukan melalui komunikasi langsung dengan petugas untuk memperoleh toleransi waktu berdagang maupun kesempatan tetap berjualan pada waktu-waktu tertentu. Dalam beberapa kasus, penelitian juga menemukan adanya praktik pemberian retribusi secara informal kepada oknum petugas sebagai upaya mengurangi risiko penertiban. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pedagang dan aparat tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi juga berlangsung melalui proses tawar-menawar yang berkembang dalam praktik di lapangan.

2. Resistensi Pasif

Selain resistensi aktif, penelitian juga menemukan adanya resistensi pasif yang dilakukan pedagang dalam aktivitas sehari-hari. Bentuk resistensi pasif yang paling dominan adalah penolakan secara diam-diam terhadap ke-

penataan. Pedagang menunjukkan kepatuhan ketika petugas melakukan penertiban dengan memin-dahkan barang dagangan atau meninggalkan lokasi sementara waktu. Akan tetapi, setelah razia selesai, mereka kembali menempati lokasi semula untuk melanjutkan aktivitas berdagang. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan yang ditampilkan hanya bersifat sementara sebagai strategi menghindari penyitaan barang dagangan dan bukan sebagai bentuk penerimaan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pedagang tetap memilih berjualan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang karena lokasi tersebut memiliki arus wisatawan yang tinggi dan memberikan peluang memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan lokasi relokasi. Selain itu, pedagang cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan aparat dengan cara mengamati situasi dari kejauhan dan kembali membuka lapak ketika kondisi dianggap aman. Pola tersebut memperlihatkan bahwa resistensi dilakukan secara tersembunyi sebagai strategi mempertahankan sumber penghidupan tanpa memunculkan konflik secara langsung dengan pemerintah.

B. Faktor yang Mendorong Resistensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya resistensi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan dengan tingginya ketergantungan pedagang terhadap pendapatan harian sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan keluarga. Sebagian besar pedagang menggantungkan seluruh penghasilannya dari aktivitas berdagang di kawasan Kota Tua sehingga setiap kebijakan yang mengurangi akses terhadap lokasi strategis dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi mereka. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis karena jauh dari arus wisatawan serta tekanan aparat penertiban melalui razia, teguran, dan penyitaan barang dagangan. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang lebih memilih kembali berjualan pada lokasi sebelumnya meskipun menyadari adanya risiko penertiban. Dengan demikian, resistensi yang muncul merupakan konsekuensi dari interaksi antara kebutuhan ekonomi pedagang dengan implementasi kebijakan penataan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi nyata di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan konsekuensi dari ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan ekonomi pedagang. Kebijakan penataan yang diarahkan untuk menciptakan kawasan wisata yang tertib, bersih, dan nyaman belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi PKL yang sangat bergantung pada lokasi berdagang yang strategis. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai bentuk

resistensi sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan mata pencaharian.

Resistensi Aktif sebagai Upaya Mempertahankan Ruang Ekonomi

Penelitian menunjukkan bahwa aksi protes terbuka merupakan bentuk resistensi aktif yang dilakukan ketika pedagang merasa kebijakan penataan telah mengancam sumber penghidupan mereka. Aksi tersebut muncul setelah berbagai upaya informal yang dilakukan pedagang tidak mampu mengubah kebijakan relokasi maupun penertiban. Dengan demikian, protes yang dilakukan bukan sekadar bentuk penolakan terhadap pemerintah, tetapi merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi agar kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang. Temuan ini sejalan dengan teori resistensi James C. Scott yang menjelaskan bahwa kelompok masyarakat dengan posisi sosial dan ekonomi yang lemah cenderung melakukan perlawanan terbuka ketika tekanan terhadap sumber penghidupan semakin besar dan ruang kompromi semakin terbatas.

Dalam konteks penelitian ini, aksi protes menjadi bentuk resistensi yang muncul setelah pedagang merasakan dampak langsung dari relokasi dan intensitas penertiban yang mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, resistensi tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelanggaran terhadap kebijakan, melainkan sebagai mekanisme mempertahankan akses terhadap ruang ekonomi yang menjadi sumber kehidupan pedagang. Selain aksi protes, penelitian juga menemukan bahwa pedagang melakukan adaptasi strategi usaha dengan mengubah waktu berdagang, memperkecil ukuran lapak, memilih lokasi yang lebih aman, serta menyesuaikan jenis dagangan agar lebih mudah dipindahkan ketika terjadi razia. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pedagang tidak hanya melakukan penolakan, tetapi juga berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan tanpa menghentikan aktivitas ekonominya. Adaptasi tersebut merupakan bentuk rasional untuk meminimalkan risiko sekaligus mempertahankan pendapatan harian.

Dalam perspektif James C. Scott, tindakan tersebut termasuk everyday resistance, yaitu bentuk perlawanan yang dilakukan melalui aktivitas sehari-hari tanpa konfrontasi langsung dengan pemegang kekuasaan. Strategi menghindari patroli, berpindah lokasi secara cepat, maupun mengurangi ukuran lapak merupakan bentuk perlawanan tersembunyi yang memungkinkan pedagang tetap memperoleh penghasilan meskipun ruang gerak dibatasi oleh kebijakan pemerintah. Temuan ini memperlihatkan bahwa resistensi tidak selalu diwujudkan melalui konflik terbuka, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk strategi adaptasi yang bersifat praktis dan berorientasi pada keberlangsungan hidup. Negosiasi dengan aparat penertiban juga menjadi bentuk resistensi aktif yang menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan pedagang tidak selalu

berlangsung secara konfrontatif. Pedagang berupaya memperoleh toleransi waktu berdagang maupun kesempatan tetap berjualan melalui komunikasi langsung dengan petugas. Praktik tersebut menggambarkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan tidak sepenuhnya bersifat kaku, tetapi dipengaruhi oleh interaksi sosial antara aparat dan masyarakat. Dengan demikian, negosiasi menjadi strategi yang dipilih pedagang untuk mempertahankan aktivitas ekonomi tanpa harus melakukan perlawanan secara terbuka.

Resistensi Pasif sebagai Strategi Bertahan Hidup

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk resistensi yang paling dominan dilakukan pedagang adalah resistensi pasif. Pedagang memperlihatkan kepatuhan ketika razia berlangsung, tetapi kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan yang ditampilkan hanya bersifat sementara untuk menghindari risiko penyitaan barang dagangan, sedangkan tujuan utama pedagang tetap mempertahankan lokasi usaha yang dinilai paling menguntungkan secara ekonomi. Fenomena tersebut sesuai dengan konsep hidden transcript yang dikemukakan James C. Scott. Dalam konsep ini, kelompok subordinat cenderung menyembunyikan bentuk perlawanan mereka di hadapan penguasa dan menampilkan kepatuhan sebagai strategi mengurangi risiko. Akan tetapi, di balik kepatuhan tersebut terdapat berbagai yang bertujuan mempertahankan kepentingan mereka. Perilaku berjualan setelah razia selesai menunjukkan bahwa pedagang tidak menerima kebijakan secara penuh, melainkan hanya menyesuaikan perilaku agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi.

Faktor Penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama munculnya resistensi. Ketergantungan pedagang terhadap pendapatan harian menyebabkan setiap kebijakan yang membatasi akses terhadap lokasi strategis dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Bagi sebagian besar pedagang, kawasan Kota Tua merupakan lokasi yang memiliki arus wisatawan tinggi sehingga memberikan peluang memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan lokasi relokasi. Akibatnya, kebijakan relokasi dipersepsikan sebagai kebijakan yang mengurangi kesempatan ekonomi mereka. Selain faktor internal tersebut, penelitian juga menemukan bahwa lokasi relokasi yang kurang strategis serta tekanan aparat penertiban menjadi faktor eksternal yang memperkuat resistensi. Lokasi relokasi yang jauh dari pusat keramaian menyebabkan jumlah pembeli menurun sehingga pendapatan pedagang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, razia yang dilakukan secara berkala menciptakan ketidakpastian dalam menjalankan usaha karena pedagang selalu menghadapi risiko pengusiran maupun penyitaan barang dagangan.

Kondisi tersebut mendorong pedagang untuk kembali memilih lokasi lama meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi bukan sekadar bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi merupakan strategi adaptif yang lahir dari interaksi antara kepentingan pemerintah dalam menata kawasan wisata dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sektor informal. Selama kebijakan penataan belum mampu menyediakan lokasi usaha yang memberikan peluang ekonomi yang setara, berbagai bentuk resistensi akan tetap muncul sebagai mekanisme mempertahankan keberlangsungan mata pencaharian. Dengan demikian, efektivitas kebijakan penataan tidak hanya ditentukan oleh penegakan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata pedagang kaki lima.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan di Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan respons yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan pedagang sebagai kelompok sasaran kebijakan. Pemerintah berupaya mewujudkan kawasan wisata yang tertib, bersih, dan nyaman melalui pelaksanaan kebijakan penataan, sedangkan pedagang lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Perbedaan kepentingan tersebut melahirkan berbagai bentuk resistensi sebagai strategi mempertahankan mata pencaharian. Bentuk resistensi yang ditemukan dalam penelitian terdiri atas resistensi aktif dan resistensi pasif. Resistensi aktif diwujudkan melalui aksi protes, adaptasi strategi berdagang, serta negosiasi dengan aparat penertiban. Sementara itu, resistensi pasif ditunjukkan melalui kepatuhan sementara ketika penertiban berlangsung, menghindari petugas, serta kembali berjualan di lokasi semula setelah kegiatan penertiban selesai.

Berbagai bentuk resistensi tersebut menunjukkan bahwa pedagang lebih memilih strategi yang mampu mempertahankan aktivitas ekonomi dengan risiko seminimal mungkin dibandingkan melakukan konfrontasi secara langsung. Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya resistensi adalah ketergantungan pedagang terhadap pendapatan harian, lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis, penurunan jumlah pembeli setelah relokasi, serta proses implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pedagang. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang tetap memilih berjualan pada lokasi yang memiliki potensi ekonomi lebih tinggi meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi

kebijakan penataan pedagang kaki lima akan lebih efektif apabila tidak hanya menitikberatkan pada aspek penertiban, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Penyediaan lokasi usaha yang memiliki potensi ekonomi, komunikasi yang partisipatif, serta program pemberdayaan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pedagang terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tujuan penataan kawasan wisata dapat dicapai tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian pedagang kaki lima.

5. REFERENSI

- Aotama, R. C., dan D. R. H. Klavert. "Dampak Sosial Relokasi PKL di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021): 1–9.
- Anwar, K. "Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta: Antara Pelestarian dan Komersialisasi." *Jurnal Arsitektur Nusantara* 6, no. 2 (2019): 45–60.
- Bayat, A. *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Damayanti, R., dan L. Wardhani. "Kota Tua Jakarta sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya." *Jurnal Pariwisata Indonesia* 13, no. 1 (2018): 1–12.
- Dye, T. R. *Understanding Public Policy*. Pearson Education, 2013.
- Firman, T. "Urban Heritage and Tourism Development in Jakarta Old Town." *International Journal of Urban Planning and Sustainable Development* 5, no. 3 (2017): 55–71.
- Hermawati, R., dan C. Paskarina. "Patterns of Power Relation of Street Vendors in Bandung City." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 5, no. 2 (2020): 214–228.
- Hidayah, F. N., dan Warsono. "Resistensi PKL Alun-Alun Bojonegoro terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro." *Journal of Civics and Moral Studies* 8, no. 1 (2023): 47–55.
- Kurniawan, D. "Dinamika PKL di Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta." *Jurnal Sosiologi Kota* 8, no. 2 (2020): 120–134.
- Kuswanto, H. "Resistensi Sosial-Ekonomi PKL terhadap Relokasi Perkotaan." 2021.
- Miles, M. B., dan A. M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Nilamsari, F., dan I. Prabawati. "Dampak Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." *Publika* 7, no. 8 (2019).
- Permadi, G. *PKL: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Jakarta: Pustaka Harapan, 2007.

- Puspitasari, I. "Warisan Budaya dan Tantangan Revitalisasi Kota Tua Jakarta." *Jurnal Warisan Budaya Nusantara* 10, no. 1 (2022): 33–49.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Scott, J. C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.
- Scott, J. C. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Wibisono, Y. "Urban Heritage Management in Jakarta: Between Global Tourism and Local Livelihoods." *Journal of Heritage Studies* 14, no. 2 (2018): 87–102.
- Yuliana, M. "Penataan PKL di Kawasan Wisata." *Jurnal Ekonomi Kerakyatan* 15, no. 1 (2021): 77–89.